

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang terbukti tangguh menghadapi berbagai krisis ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.¹

Di tingkat daerah, Kota Padang menunjukkan pertumbuhan UMKM yang sangat pesat, khususnya pascapandemi Covid-19. Pemerintah Kota Padang melalui berbagai program pembinaan, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan akses permodalan terus mendorong pengembangan UMKM agar mampu meningkatkan daya saing usaha.² Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, jumlah UMKM pada tahun 2025 mencapai 47.289 unit usaha yang tersebar di 11 kecamatan.³ Secara khusus, UMKM sektor kuliner merupakan subsektor terbesar yang mendominasi lebih dari 43% dari total

¹ Niaga Asia, "Kontribusi UMKM Terhadap PDB Indonesia 60,51 Persen Dan Serap 96,92 Tenaga Kerja," 2024, <https://www.niaga.asia/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-indonesia-6051-persen-dan-serap-9692-tenaga-kerja/>.

² Diskominfo Kota Padang, "Dorong Digitalisasi Produk, UMKM Binaan Pemko Padang Tembus 47.692," 2025, <https://padang.go.id/index.php/berita/dorong-digitalisasi-produk-umkm-binaan-pemko-padang-tembus-47692>.

³ Padang Ekspres, "Dinas Koperasi Dan UKM Rilis Data Terbaru UMKM Padang Capai 47.289 Unit," 2025, <https://padek.jawapos.com/padang/2505060019/dinas-koperasi-dan-ukm-rilis-data-terbaru-umkm-padang-capai-47289-unit>.

UMKM di Kota Padang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 1
Data UMKM Kuliner Kota Padang Tahun 2025

No	Kecamatan	UMKM Usaha Kuliner		Total
		Kemasan	Saji	
1.	Padang Barat	271	1.874	2.145
2.	Padang Selatan	501	1.857	2.358
3.	Padang Timur	400	1.700	2.100
4.	Padang Utara	322	1.245	1.567
5.	Nanggalo	314	858	1.172
6.	Koto Tengah	925	2.115	3.040
7.	Kuranji	790	2.079	2.869
8.	Pauh	308	1.057	1.365
9.	Lubuk Kilangan	246	704	950
10.	Lubuk Begalung	604	1.642	2.246
11.	Bungus Teluk Kabung	187	792	979
Total		4.868	15.923	20.791

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang (2025)

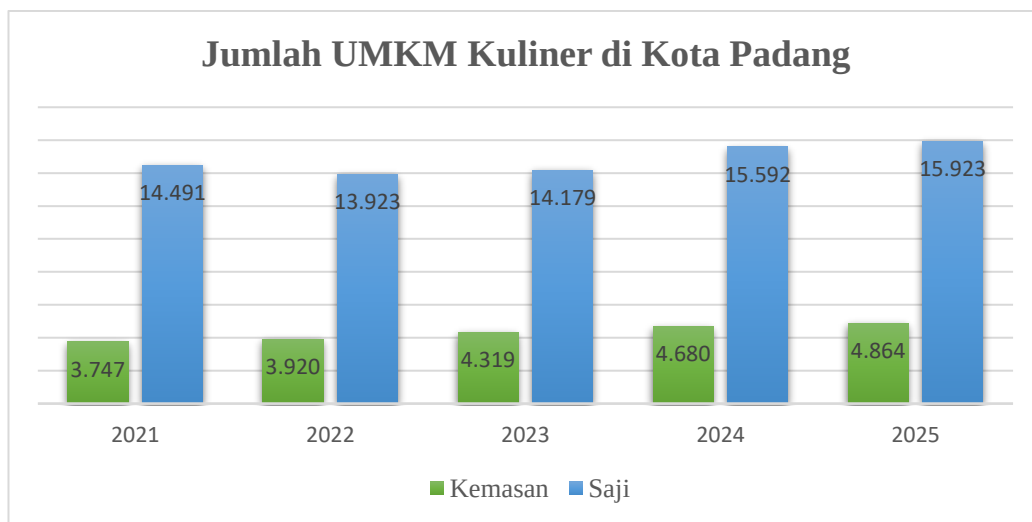
Berdasarkan tabel data UMKM kuliner di Kota Padang, sebaran UMKM kuliner tersebut mencakup seluruh 11 kecamatan di Kota Padang dengan jenis kuliner kemasan dan kuliner saji. Kecamatan Koto Tengah merupakan wilayah dengan jumlah UMKM kuliner tertinggi yakni sebanyak 3.040 unit. Sementara itu, Kecamatan Lubuk Kilangan mencatat jumlah paling sedikit dengan jumlah 950 unit. Perbedaan sebaran ini menunjukkan bahwa jumlah UMKM kuliner cenderung lebih tinggi di wilayah dengan kepadatan

penduduk dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, namun secara keseluruhan telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Kota Padang.

Untuk melihat perkembangan UMKM kuliner di Kota Padang secara keseluruhan dapat dilihat pada diagram berikut, yang menunjukkan tren perkembangan UMKM dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 1. 1

Perkembangan Jumlah UMKM Kuliner Kota Padang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang (2025)

Berdasarkan diagram perkembangan UMKM kuliner di Kota Padang menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat sepanjang periode 2021-2025. Kuliner saji secara konsisten meningkat dibandingkan kuliner kemasan di setiap tahunnya. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, jumlah kuliner saji kembali pulih dan meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2025. Tren pertumbuhan ini mencerminkan ketangguhan sektor kuliner dalam beradaptasi pascapandemi Covid-19, sekaligus mengindikasikan

meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk kuliner lokal di Kota Padang.

Perkembangan UMKM kuliner berjalan seiringan dengan pesatnya pertumbuhan layanan keuangan digital di Indonesia. Layanan keuangan digital yang berkembang pesat saat ini mencakup *mobile banking*, *internet banking*, dompet digital (*e-wallet*), serta sistem pembayaran berbasis QRIS. Sejak diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, pengguna QRIS mengalami peningkatan signifikan, dengan jumlah mencapai sekitar 50,5 juta dan *merchant* mencapai 32,71 juta pada tahun 2024.⁴ Perkembangan ini juga tercermin di Sumatera Barat, dimana hingga Juni 2025 jumlah pengguna QRIS telah mencapai 930.236 orang dengan total 624.737 *merchant*, serta volume transaksi sebanyak 26,3 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp3,15 triliun.⁵ Namun angka ini baru menjangkau sekitar 16% dari total penduduk Sumatera Barat yang berjumlah 5,83 juta jiwa,⁶ menunjukkan masih besarnya ruang pertumbuhan layanan keuangan digital, khususnya dikalangan pelaku UMKM yang belum sepenuhnya mengadopsi layanan digital dalam aktivitas usahanya.

Besarnya potensi tersebut mendorong pemerintah untuk menghadirkan program digitalisasi yang secara khusus menyasar UMKM kuliner di Kota

⁴ Hosea Immanuel Latumahina and Annisa Sekar Mulyanto, “QRIS: Menelusuri Dinamika Transformasi Pembayaran Digital di Indonesia” (Yogyakarta: Center for Digital Society (CfDS), Universitas Gadjah Mada, 2024), <https://digitalsociety.id/wp-content/uploads/2025/01/Case-Study-107-Desember-2024.pdf>.

⁵ Klikpositif.com, “Hingga Juni 2025, Transaksi QRIS Di Sumbar Capai Rp 3,15 Triliun,” 2025, <https://klikpositif.com/hingga-juni-2025-transaksi-qr-is-di-sumbar-capai-rp-315-triliun/>.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, “Proyeksi Jumlah Penduduk Sumatera Barat Pertengahan Tahun 2024” (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024), <https://sumbar.bps.go.id>.

Padang. Bank Indonesia melalui program SIAP QRIS (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) secara resmi menjadikan Pasar Raya Padang sebagai salah satu lokasi percontohan implementasi ekosistem pembayaran digital di Sumatera Barat, yang secara khusus menyasar pelaku UMKM kuliner sebagai segmen utama.⁷ Komitmen ini diperkuat oleh Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Padang periode 2025–2029 yang menjadikan digitalisasi UMKM halal dan peningkatan literasi keuangan syariah sebagai fokus program utamanya.⁸ Namun demikian, besarnya perhatian pemerintah tersebut belum serta-merta diiringi pemahaman yang memadai dari pelaku usaha itu sendiri.

Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mencatat penambahan lebih dari 117 ribu pengguna baru QRIS hingga September 2024, yang mayoritas adalah pelaku UMKM.⁹ Putri dan Putri (2024) menemukan bahwa rendahnya kemampuan serta pengetahuan pelaku UMKM kuliner dalam memanfaatkan teknologi digital, serta adanya hambatan dari kebijakan penetapan tarif *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS yang dibebankan kepada pedagang.¹⁰ Kondisi ini menegaskan perlunya pemahaman mendalam

⁷ Tim Redaksi, “BI Resmikan Penggunaan SIAP QRIS Di 3 Pasar Di Padang,” 2022, <https://langgam.id/bi-resmikan-penggunaan-siap-qr-is-di-3-pasar-di-padang/>.

⁸ Padang Ekspres, “KDEKS Kota Padang 2025–2029 Fokus UMKM Halal Dan Literasi Keuangan Syariah,” 2026, <https://padek.jawapos.com/padang/2367033703/kdeks-kota-padang-20252029-fokus-umkm-halal-dan-literasi-keuangan-syariah>.

⁹ Muhammad Zulfikar, “BI Catat 117.991 Pengguna Baru QRIS Di Sumbar Sepanjang 2024,” 2024, <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/638985/bi-catat-117991-pengguna-baru-qr-is-di-sumbar-sepanjang-2024>.

¹⁰ Restia Rahma Dilla Putri and Nora Eka Putri, “Implementasi Program SIAP QRIS Pada Sektor UMKM Kuliner Di Pasar Raya Kota Padang,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2024): 14, <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.125>.

tentang faktor yang sesungguhnya mendorong atau menghambat adopsi layanan keuangan digital pada UMKM kuliner di Kota Padang.

Penggunaan layanan keuangan digital oleh pelaku UMKM didorong oleh kebutuhan praktis dalam menjalankan usaha. Pelaku UMKM dituntut untuk melakukan transaksi secara lebih cepat, efisien, dan aman, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen yang cenderung beralih ke sistem pembayaran non-tunai.¹¹ Selain itu, penggunaan layanan keuangan digital juga mempermudah pencatatan keuangan dan meningkatkan akurasi laporan keuangan secara *real-time*, serta memungkinkan UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di era digital.¹²

Untuk memahami fenomena adopsi layanan keuangan secara teoritis, penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) sebagai kerangka utama, yang menjelaskan bahwa keputusan individu untuk mengadopsi suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan.¹³ Model ini dipilih karena telah terbukti konsisten dalam menjelaskan perilaku adopsi teknologi keuangan digital pada pelaku UMKM di berbagai konteks penelitian.

¹¹ Michelle Britney Attan & Joceline Sagita Landias Khairina Natsir, Nurainun Bangun, "Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM," *Jurnal Serina Abdimas* 1, no. 3 (2023): 1154–63, <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26208>.

¹² Dian Widiyati Riska Pradisa, Amelia Tirana Sita, Elfin Krisdayanti Hia, Fachruli Hayu Biyantarmelia, "Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Self Efficacy, Dan Lifestyle Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa/I Akuntansi," *JUMMA'45: Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 2 (2025): 1140–56, <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/JUMMA45/article/view/5211/4002>.

¹³ F D Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319–40, <https://doi.org/10.2307/249008>.

Berdasarkan kerangka TAM yang dikembangkan oleh Davis (1989), keputusan individu untuk mengadopsi suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*),¹⁴ serta diperkaya oleh Kim, Ferrin, dan Rao (2008) yang menegaskan bahwa persepsi risiko berperan sebagai mekanisme psikologis yang menjembatani pengetahuan kognitif pengguna dengan perilaku aktual penggunaan layanan digital.¹⁵ Dalam penelitian Edo, Soma, dan Sitorus (2024) terdapat enam faktor yang mempengaruhi adopsi layanan keuangan digital pada UMKM, yaitu persepsi kemudahan, persepsi manfaat, literasi keuangan, kepercayaan, inovasi pengguna, dan dukungan pemerintah.¹⁶

Selain itu, dalam penelitian Dewi Fitriana dan Peni Haryanti menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan *perceived usefulness* menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan layanan keuangan digital.¹⁷ Berdasarkan berbagai faktor yang teridentifikasi pada penelitian-penelitian terdahulu di atas, serta dengan mempertimbangkan karakteristik lokal pelaku UMKM kuliner di Kota Padang yang mayoritas Muslim dan berlatar belakang pedagang tradisional, penelitian ini memfokuskan pada tiga

¹⁴.Davis.

¹⁵ D J Kim, D L Ferrin, and H R Rao, "A Trust-Based Consumer Decision-Making Model in Electronic Commerce: The Role of Trust, Perceived Risk, and Their Antecedents," *Decision Support Systems* 44, no. 2 (2008): 544–64, <https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.07.001>.

¹⁶ R Edo, A Soma, and B Sitorus, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adopsi Layanan Keuangan Digital Pada UMKM," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 28, no. 1 (2024): 45–60.

¹⁷ Dewi Fitriana and Peni Haryanti, "Literasi Keuangan Syariah Dan Perceived Usefulness Terhadap Penggunaan E-Service," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan* 10, no. 3 (2024): 297–308.

variabel yang dinilai paling relevan, yaitu literasi keuangan syariah, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko.

Literasi keuangan syariah dipilih sebagai variabel independen pertama karena mayoritas pelaku UMKM kuliner di Kota Padang adalah Muslim yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam filosofi budaya Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Pemahaman tentang prinsip syariah dalam transaksi digital bukan sekedar pengetahuan akademis, melainkan menjadi filter utama yang menentukan apakah seseorang bersedia atau menolak menggunakan suatu layanan keuangan digital.¹⁸

Berdasarkan SNLIK OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum berada pada angka 49,68%,¹⁹ namun indeks literasi keuangan syariah secara khusus baru mencapai 30%.²⁰ Di Sumatera Barat, meskipun indeks literasi keuangan mencapai 52,39%, indeks literasi keuangan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan indeks literasi keuangan konvensional.²¹

¹⁸ I Rawana, D Yusri, and K Sakdiah, "Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 3 (2024): 16–34.

¹⁹ Tim M N C Portal, "OJK Umumkan Hasil SNLIK 2022: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia Meningkat," 2022, <https://ekbis.sindonews.com/read/926771/77/ojk-umumkan-hasil-snlk-2022-indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-indonesia-meningkat-1667063458>.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022," 2022, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>.

²¹ Rita Rahayu and Raudhatul Hidayah, "Kondisi Terkini Indeks Literasi Keuangan Syariah Di Sumatera Barat," 2022, <https://minangkabaunews.com/kondisi-terkini-indeks-literasi-keuangan-syariah-di-sumatera-barat/>.

Berdasarkan hasil survey pra penelitian pada beberapa pelaku UMKM kuliner di Kota Padang, sebagian besar pelaku usaha mengaku tidak mengetahui konsep literasi keuangan syariah, dan belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun edukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dalam konteks transaksi digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun pelaku UMKM kuliner di Kota Padang telah menggunakan layanan keuangan digital dalam keseharian usahanya, pemahaman mereka terhadap aspek kesyariahan dari layanan tersebut masih sangat minim, sehingga berpotensi mempengaruhi kepercayaan dan keputusan mereka dalam menggunakan layanan keuangan digital secara berkelanjutan. Rawana, Yusri, dan Sakdiah (2024) menegaskan bahwa literasi keuangan syariah yang memadai mampu mengurangi keraguan terhadap layanan digital yang dianggap bertentangan dengan nilai agama.²²

Persepsi kemudahan penggunaan dipilih sebagai variabel independen kedua karena sebagian besar perilaku UMKM kuliner di Kota Padang merupakan pedagang tradisional yang tidak memiliki latar belakang teknologi, sehingga tingkat kemudahan dalam mempelajari dan mengoperasikan layanan keuangan digital menjadi penentu utama keputusan adopsi mereka. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (2024), tingkat penggunaan QRIS di kalangan UMKM Kota Padang terus meningkat, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara pelaku usaha skala

²² Rawana, Yusri, and Sakdiah, "Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM."

menengah yang relatif melek teknologi dengan pelaku usaha skala kecil yang masih menghadapi hambatan teknis dalam pengoperasian layanan digital.²³

Berdasarkan hasil survey pra penelitian pada beberapa pelaku UMKM kuliner di Kota Padang, terdapat perbedaan pengalaman yang dirasakan oleh para pelaku UMKM kuliner di Kota Padang. Sebagian pelaku usaha, terutama pedagang berskala kecil, menghadapi kendala pada mekanisme pencairan dana QRIS yang tidak langsung masuk ke rekening secara *real-time*. Hal ini dirasakan menyulitkan ketika pelaku usaha membutuhkan dana tunai dalam waktu mendesak, seperti yang dialami salah seorang pedagang minuman yang kehabisan bahan baku namun tidak memiliki uang tunai karena pembayaran dari pembeli masih tertahan di sistem QRIS dan belum dapat dicairkan.

Di sisi lain, banyak pelaku usaha yang justru merasakan kemudahan yang signifikan dengan adanya sistem pembayaran digital. Pembeli yang tidak membawa uang tunai tetap dapat bertransaksi menggunakan saldo rekening atau dompet digital mereka. Selain itu, pembayaran digital juga dinilai membantu pelaku usaha dalam menghindari permasalahan uang kembalian, yang kerap menjadi kendala ketika pembeli membayar dengan nominal yang tidak sesuai dengan harga pembelian, terutama saat pelaku usaha tidak memiliki uang pecahan kecil. Ikwanto dan Indriani (2024) menegaskan bahwa

²³ Bank Indonesia, “Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Mei 2024” (Padang: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, 2024), <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Barat-Mei-2024.aspx>.

persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan pembayaran digital QRIS pada pelaku UMKM.²⁴

Persepsi risiko ditetapkan sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini karena kekhawatiran terhadap keamanan data, penipuan digital, dan kegagalan transaksi terbukti masih menjadi hambatan utama adopsi layanan keuangan digital dikalangan pedagang tradisional Kota Padang, sekaligus berperan sebagai mekanisme psikologis yang menjembatani antara pengetahuan kognitif pengguna dengan perilaku aktual penggunaan layanan digital.²⁵ Secara nasional, APJII (2023) mencatat bahwa sebesar 36,4% pengguna internet masih merasa khawatir terhadap keamanan data pribadi dalam transaksi digital, dan 28,7% di antaranya pernah mengalami kasus penipuan berbasis digital.²⁶

Kekhawatiran serupa juga ditemukan di tingkat lokal, berdasarkan hasil survey pra penelitian pada beberapa pelaku UMKM kuliner di Kota Padang, tidak luput dari pengalaman penipuan dalam transaksi digital. Salah satu modus yang ditemukan di lapangan adalah pembeli yang menunjukkan bukti pembayaran lama dari transaksi sebelumnya seolah-olah sebagai bukti pembayaran yang baru dilakukan, memanfaatkan kelalaian penjual dalam memverifikasi tanggal dan waktu transaksi. Kejadian ini mendorong para pelaku usaha untuk mengambil langkah antisipasi mandiri, yakni dengan

²⁴ Azisma Nur Putri Ikwanto and Farida Indriani, "The Impact of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Digital Literacy on QRIS Adoption," *Research Horizon* 4, no. 6 (2024): 281–90.

²⁵ Kim, Ferrin, and Rao, "A Trust-Based Consumer Decision-Making Model in Electronic Commerce: The Role of Trust, Perceived Risk, and Their Antecedents."

²⁶ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Survei Penetrasi Internet Indonesia" (APJII, 2024), <https://survei.apjii.or.id/survei/group/8>.

memfoto bukti pembayaran yang ditunjukkan oleh pembeli setiap kali terjadi transaksi digital, sebagai upaya untuk memastikan keabsahan pembayaran. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun layanan keuangan digital memberikan kemudahan, risiko penipuan masih menjadi tantangan nyata yang dihadapi pelaku UMKM kuliner di Kota Padang, dan memerlukan perhatian lebih lanjut baik dari sisi edukasi maupun kebijakan. Sebayang dan Rahmayati (2023) menemukan bahwa persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan digital pada UMKM, dimana semakin tinggi kekhawatiran pelaku usaha terhadap risiko keamanan dan penipuan digital, semakin rendah kecenderungan mereka untuk menggunakan layanan tersebut secara aktif dan berkelanjutan.²⁷

Kekhawatiran yang dirasakan oleh pelaku UMKM kuliner di Kota Padang terhadap penggunaan layanan keuangan digital tidak selalu dipicu oleh ancaman dari luar, melainkan sering kali berakar dari ketidakpastian dan rasa tidak percaya diri yang muncul akibat pengalaman langsung dalam menghadapi kegagalan sistem yang terjadi tanpa terduga. Berdasarkan hasil survei pra penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah pelaku UMKM kuliner di Kota Padang, ditemukan kasus nyata yang berkaitan dengan kegagalan sinkronisasi sistem pembayaran digital (*system synchronization failure*). Pelaku UMKM kuliner di Kota Padang kerap menghadapi situasi di mana

²⁷ N I T Sebayang and Rahmayati, "Pengaruh Persepsi Kepercayaan Dan Persepsi Keamanan Terhadap Minat Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital UMKM Halal Kota Medan," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 491–502, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/14590>.

transaksi pembayaran digital dinyatakan gagal oleh sistem, baik dalam bentuk gagal transfer, gagal bayar, maupun gagal settlement (penyelesaian pembayaran). Kondisi yang paling meresahkan adalah ketika pembeli telah benar-benar melakukan pembayaran dan dana telah terdebit dari rekening atau dompet digital pembeli, namun sistem perbankan atau penyedia layanan pembayaran gagal meneruskan dana tersebut kepada rekening penjual, sehingga penjual tidak menerima konfirmasi pembayaran apapun di pihaknya.

Situasi ini menempatkan pelaku UMKM kuliner pada posisi yang sangat sulit karena mereka tidak memiliki kemampuan teknis untuk memverifikasi apakah transaksi benar-benar berhasil atau tidak, tidak mengetahui kepada siapa harus melapor, dan tidak memahami prosedur klaim pengembalian dana yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama merugikan: menyerahkan produk tanpa kepastian pembayaran diterima, atau menahan produk dan berisiko kehilangan pelanggan. Sebagian besar pelaku UMKM kuliner yang ditemui dalam survei pra penelitian mengaku lebih memilih kembali menerima pembayaran tunai untuk transaksi bernilai besar justru karena pengalaman kegagalan sinkronisasi sistem yang pernah mereka alami sebelumnya, meskipun mereka tetap menggunakan QRIS untuk transaksi sehari-hari berskala kecil.

Pemilihan UMKM kuliner di Kota Padang sebagai objek penelitian didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, UMKM kuliner merupakan subsektor terbesar di Kota Padang dengan 20.791 unit yang tersebar di seluruh

11 kecamatan, sehingga representatif sebagai objek kajian adopsi layanan keuangan digital. Kedua, mayoritas pelaku UMKM kuliner di Kota Padang adalah Muslim yang menjadikan nilai-nilai syariah sebagai landasan keputusan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, sehingga dimensi literasi keuangan syariah menjadi sangat relevan untuk dikaji. Ketiga, meskipun program digitalisasi telah berjalan, masih terdapat kesenjangan nyata antara ketersediaan program dengan pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan layanan keuangan digital secara aktual, sebagaimana dikonfirmasi oleh Putri dan Putri (2024) serta hasil survei pra penelitian yang dilakukan terhadap pelaku UMKM kuliner di Kota Padang.²⁸

Meskipun penelitian mengenai adopsi layanan keuangan digital pada UMKM telah banyak dilakukan, terdapat beberapa celah penelitian (research gap) yang belum terjawab secara memadai, kajian yang secara spesifik menggunakan literasi keuangan syariah sebagai variabel independen masih sangat terbatas karena sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan literasi keuangan konvensional. Persepsi risiko dalam penelitian terdahulu umumnya ditempatkan sebagai variabel independen atau moderasi, bukan sebagai variabel mediasi yang menjembatani literasi keuangan syariah dan persepsi kemudahan dengan penggunaan layanan digital. Penelitian terdahulu juga masih terbatas dalam menguji peran mediasi persepsi risiko pada

²⁸ Putri and Putri, "Implementasi Program SIAP QRIS Pada Sektor UMKM Kuliner Di Pasar Raya Kota Padang."

hubungan antara literasi keuangan syariah dan penggunaan layanan digital, sebagaimana terlihat dari perbedaan pendekatan model antara Rawana, Yusri, dan Sakdiah (2024) yang menguji pengaruh langsung literasi keuangan syariah terhadap penggunaan layanan keuangan digital, dengan Purwantini dan Anisa (2021) yang justru menyoroti pentingnya mediasi faktor psikologis seperti persepsi risiko agar pengaruh tersebut terwujud.²⁹ Demikian pula pada variabel persepsi kemudahan, Ikwanto dan Indriani (2024) menemukan pengaruh positif signifikan, namun penelitian lain menunjukkan bahwa persepsi kemudahan saja tidak cukup mendorong penggunaan layanan digital apabila pelaku usaha masih memiliki kekhawatiran terhadap risiko transaksi.³⁰ Belum ada penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut secara bersamaan pada UMKM kuliner di Kota Padang. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan dan pembeda utama penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian mengenai *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Persepsi Kemudahan terhadap Penggunaan Layanan Keuangan Digital pada UMKM Kuliner di Kota Padang dengan Persepsi Risiko sebagai Variabel Mediasi* menjadi penting dan relevan untuk dilakukan.

²⁹ Anissa Hakim Purwantini and Fritztina Anisa, "FinTech Payment Adoption Among Micro-Enterprises: The Role of Perceived Risk and Trust," *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 13, no. 2 (2021): 375–86, <https://doi.org/10.17509/jaset.v13i2>.

³⁰ Ikwanto and Indriani, "The Impact of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Digital Literacy on QRIS Adoption."

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada pokok permasalahan, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada beberapa hal berikut. Pertama, objek penelitian dibatasi pada pelaku UMKM (usaha mikro) sektor kuliner (makanan dan minuman) yang aktif beroperasi di Kota Padang dan telah menggunakan minimal satu layanan keuangan digital dalam kegiatan usahanya. Kedua, variabel yang dikaji meliputi literasi keuangan syariah (X1), persepsi kemudahan (X2), persepsi risiko (Z), dan penggunaan layanan keuangan digital (Y). Ketiga, ruang lingkup layanan keuangan digital yang diteliti mencakup mobile banking, dompet digital (e-wallet), serta sistem pembayaran berbasis QRIS. Keempat, wilayah penelitian dibatasi pada Kota Padang dan tidak mencakup daerah lain di Sumatera Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini dapat dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan layanan keuangan digital pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan terhadap penggunaan layanan keuangan digital pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh persepsi risiko terhadap penggunaan layanan keuangan digital pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap persepsi risiko pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang?

5. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan terhadap persepsi risiko pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang?
6. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan layanan keuangan digital yang dimediasi oleh persepsi risiko pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang?
7. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan terhadap penggunaan layanan keuangan digital yang dimediasi oleh persepsi risiko pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan layanan keuangan digital pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap penggunaan layanan keuangan digital pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap penggunaan layanan keuangan digital pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap persepsi risiko pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap persepsi risiko pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang.

6. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan layanan keuangan digital yang dimediasi oleh persepsi risiko pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang.
7. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap penggunaan layanan keuangan digital yang dimediasi oleh persepsi risiko pada pelaku UMKM kuliner di Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

2. Manfaat secara teoritis

Bagi penulis penelitian ini sebagai pengetahuan terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan perilaku pengguna layanan keuangan digital. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara literasi keuangan syariah, kemudahan, risiko, dan perilaku adopsi pada teknologi digital.

3. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Pelaku UMKM Kuliner: Memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi keuangan syariah serta kesadaran terhadap risiko penggunaan layanan keuangan digital.
- b. Bagi Lembaga Keuangan: Menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan layanan digital yang mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah.

- c. Bagi Pemerintahan dan Akademis: Menjadi masukan dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan serta penguatan literasi keuangan berbasis syariah di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya skripsi ini dan tersusun secara sistematis, maka penulis mengurutkan berdasarkan bab-bab dan berupa sub-sub dalam penelitian ini, maka pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori yang berkenaan dengan variabel penelitian, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, instrumen dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian yang akan disajikan dan dianalisa terhadap data-data yang ada serta konsep-konsep yang ditentukan dari analisa data tersebut

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari sebuah skripsi, supaya pembaca dapat melihat kesimpulan dan saran dari skripsi.

